



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 8 Januari 2025/Khusus - Awal Menjabat)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : KEMENTERIAN KESEHATAN
UNIT KERJA : INSPEKTORAT JENDERAL

I. DATA PRIBADI

1. Nama : **TOGU SIHOMBING**
2. Jabatan : **INSPEKTUR IV**
3. NHK : **989293**

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. ----

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. **433.500.000**

1. MOBIL, TOYOTA KIJANG INNOVA V AT Tahun 2012, HASIL SENDIRI Rp. 150.000.000
2. MOBIL, HONDA HRV SE AT Tahun 2018, HASIL SENDIRI Rp. 250.000.000
3. MOTOR, HONDA SCOOPY 110 CC Tahun 2013, HASIL SENDIRI Rp. 9.000.000
4. MOTOR, SUZUKI THUNDER EN 125 Tahun 2006, HASIL SENDIRI Rp. 6.000.000
5. MOTOR, HONDA SCOOPY SE Tahun 2024, HASIL SENDIRI Rp. 18.500.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. **200.000.000**

D. SURAT BERHARGA Rp. ----

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. **760.537.527**

F. HARTA LAINNYA Rp. ----

Sub Total Rp. **1.394.037.527**

III. HUTANG Rp. **3.000.000**

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) Rp. **1.391.037.527**

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara



Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.